

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Samad. 2008. *Konstruksi HTN Indonesia Pasca Amandmen UDD 1945*. Surabaya : Pustaka Sinar Harapan.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil dan Christine S. T. Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2014. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah (Mekanisme Pemberhentian menurut sistem Pemerintahan di Indonesia)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- J. Kaloh. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Ed.1.Cet.2*. Jakarta : Sinar Grafika.
- J.M. Van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*. Bandung: Binacipta.
- Jum Anggraini. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisiusus.
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Philipus M. Hadjon, et al. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Teguh Prasetyo. 2004. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 298/B/2016/PT.TUN.JKT.

Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN.Plg

Internet

<http://news.detik.com/berita/3169761/mendagri-soal-pemberhentian-bupati-nofi-sudah-dibuktikan-bnn?single=1> diakses pada tanggal 20 september 2016 Pukul 12:38 WIB.

www.kemendagri.go.id

